

PENDAHULUAN

Bagi dunia pendidikan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Dalam menghadapi tantangan global, tugas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) semakin berat karena selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, pendidikan di UPI, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, UPI harus mengembangkan rencana strategisnya untuk jangka waktu lima tahun, 2006-2010. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dan hasil-hasil Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman serta transisi budaya korporasi yang ada saat ini. Selanjutnya, dikembangkan kebijakan, sasaran, strategi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional tanpa mengabaikan kemungkinan penerapan standar internasional.

Keseluruhan upaya pengembangan UPI itu bertumpu pada wawasan kebangsaan dan penghayatan terhadap kemajemukan budaya, dan landasan falsafah kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius.

BAB I

EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA 1999-2004 DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK

Perubahan status UPI menjadi sebuah *corporate university* berstatus BHMN membangkitkan tuntutan baru berupa kesiapan mental untuk lebih mampu memainkan peranan sebagai agen perubahan. Pada saat yang sama, UPI harus siap mengisi dan memberikan arah kepada pembangunan bangsa. Hal ini dikaitkan dengan fungsi pendidikan tinggi yang tidak saja berorientasi pada penciptaan perubahan pada tingkat mikro individual, tetapi juga pada tingkat makro dalam bentuk perubahan sosial menuju masyarakat madani yang berbasis pada nilai moral Pancasila, dan pertumbuhan ekonomi untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik.

Pada dasarnya Renstra UPI 2006-2010 merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya dan disusun dengan memperhatikan perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu penyusunan Renstra UPI 2006-2010 bertitik tolak dari data dan informasi tentang tingkat capaian pelaksanaan Renstra UPI 1999-2004 serta permasalahan yang belum terpecahkan secara optimal dan perlu ditindaklanjuti. Dalam kaitan inilah, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 1999-2004 dilakukan.

A. TINGKAT CAPAIAN TUJUAN

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program yang dipayungi Renstra 1999-2004 merupakan modal bagi pengembangan UPI pada lima tahun mendatang. Sebanyak

12 kebijakan dan 68 program diluncurkan dalam payung Renstra tersebut. Hal itu meliputi bidang akademik, ketenagaan, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan manajemen, kemahasiswaan, kerjasama nasional dan internasional, komunikasi dan kebudayaan, pendidikan keimanan dan ketaqwaan, pascasarjana, dan pembiayaan.

Berdasarkan data yang terhimpun dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terungkap bahwa seluruh program dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Berdasarkan seperangkat indikator yang telah dirumuskan diperoleh nilai rata-rata pencapaian tujuan sebesar 86,08 (skala nilai capaian 0-100), dan ini tergolong kategori “Sangat Berhasil.” Di lain pihak, masih ditemukan adanya beberapa persoalan yang perlu ditanggulangi secara lebih sistematis, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM yang memiliki daya dukung terhadap peningkatan kinerja universitas;
- 2) Peningkatan mutu pendidikan sesuai ketentuan perundangan baru untuk memperkuat daya saing lulusan;
- 3) Peningkatan wawasan kebangsaan, kepribadian, profesionalisme, dan kompetensi sosial sebagai dasar untuk membangun budaya kerja universitas korporat (*corporate university*);
- 4) Peningkatan fasilitas pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- 5) Peningkatan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan untuk mewujudkan kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius;

- 6) Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun luar negeri untuk memperkuat citra dan kinerja universitas pelopor dan unggul;
- 7) Penggalan dana dari berbagai sumber baik konvensional maupun inkonvensional;
- 8) Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai program pengembangan bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- 9) Pemasaran produk unggulan UPI melalui perluasan pasar dan perluasan jangkauan publikasi;
- 10) Bantuan penanganan kesulitan kesempatan kerja bagi lulusan UPI;
- 11) Peningkatan kemampuan lobi dan pemanfaatan peluang pada tingkat lokal, nasional dan internasional;

B. KONDISI YANG DIHADAPI DAN DAMPAK LINGKUNGAN STRATEGIK

UPI dihadapkan pada persoalan yang kompleks, mengingat kondisi dan karakteristik mahasiswanya yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Dengan demikian, pendapatan universitas dari masyarakat yang bersumber dari SPP belum merupakan andalan utama.

Jumlah peminat masuk UPI setiap tahun rata-rata 26.000 pelamar. Selama satu dekade terakhir, hasil tes masuk calon mahasiswa berkisar antara 450-700 dari skor tertinggi 1.000. Ini berarti UPI menerima mahasiswa dengan potensi akademik yang amat beragam. Namun, dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen menjadi Undang-Undang diyakini bahwa minat

masyarakat untuk memilih UPI sebagai pilihan utama akan meningkat.

Lulusan UPI rata-rata 4.000 orang per tahun dan hanya sekitar 10% (terutama lulusan PGSD) diserap menjadi pegawai negeri sipil. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki anggaran yang memadai untuk mengangkat lulusan sebagai PNS, walaupun kebutuhan akan tenaga guru masih sangat besar. Oleh karenanya, UPI harus memperhatikan kebutuhan tenaga kependidikan di sektor non-pemerintah baik jumlah maupun mutu kompetensi profesionalnya.

Kebijakan untuk menambah sumber pendapatan melalui peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima berdampak pada semakin melemahnya daya dukung fasilitas belajar. Keterbatasan infrastruktur untuk mengakomodasi pengalaman belajar pada gilirannya memperlemah proses belajar-mengajar. Hal ini tercermin dari kecilnya jumlah curahan waktu mahasiswa untuk aktif belajar. Implementasi sistem kredit semester belum mencapai beban belajar yang optimal untuk memperoleh hasil belajar yang diharapkan.

Kecenderungan di atas diperkirakan akan terus berlanjut pada sekitar lima tahun mendatang apabila krisis ekonomi belum pulih. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan orang tua untuk memenuhi semua bentuk pengeluaran pendidikan, termasuk pengeluaran kebutuhan hidup pribadi mahasiswa.

Upaya pengembangan lowongan kerja paroh waktu bagi mahasiswa melalui pengembangan usaha universitas merupakan sebuah jalur untuk ikut mengatasi kesulitan ekonomi. Namun, pengembangan usaha ini memerlukan modal dan tenaga pengelola yang handal, di samping

kejelian pengembangan jenis usaha yang tepat untuk membangkitkan sumber-sumber pendapatan.

Ciri kependudukan di Indonesia yang ditandai dengan besarnya prosentase kelompok usia muda berpengaruh terhadap peningkatan arus siswa pendaftar. Upaya universitas untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia hingga 20-25% terbentur pada keterbatasan kemampuan orang tua dan mahasiswa, serta kapasitas daya tampung dan pelayanan UPI. Dengan demikian, persoalan perluasan layanan dan daya tampung universitas untuk menjangkau perluasan penyelenggaraan kampus daerah dan program internasional memerlukan peningkatan

Dalam kaitan itu, modernisasi kampus merupakan sebuah prasyarat bagi UPI untuk lebih mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Termasuk di dalamnya adalah segala bentuk fasilitas dan kelengkapannya, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, faktor transaksi antara pendidik dan peserta didik tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi informasi, sehingga kedudukan tenaga kependidikan tetap strategis. Pemutakhiran model pembelajaran dan penyegaran substansi merupakan tuntutan yang mendesak dan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh hasil penelitian inovatif.

Jumlah dosen UPI yang berkualifikasi pendidikan S2 dan S3 sebanyak 790 orang (60,86 %) merupakan sumber daya potensial untuk mendukung pengembangan universitas. Tetapi, hal ini akan lebih bermanfaat apabila semua kemampuan itu dapat didayagunakan secara penuh dalam pelaksanaan tugas layanan. Apabila ketenagaan itu tidak dapat dikonsolidasi, universitas akan menghadapi

sebuah paradoks: yakni peningkatan kualifikasi dosen tidak diiringi dengan peningkatan kontribusinya kepada pengembangan UPI. Dengan demikian, universitas menghadapi gangguan dalam sistem pendayagunaan ketenagaan yang apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan akibat yang sangat fatal.

Persoalan kompleks lainnya terkait dengan sistem penghargaan dan kendali kinerja staf akademik. Apabila diinginkan kenaikan insentif rata-rata Rp 1.000.000,- per staf akademik setiap bulannya, misalnya, maka universitas perlu menyediakan dana sekurang-kurangnya Rp 1,3 milyar per bulan; suatu jumlah yang sangat besar dan di luar kemampuan UPI pada saat ini.

Tuntutan pasar kerja terhadap sumber daya manusia yang bermutu membuat persaingan semakin ketat. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pendidikan dari motif sosial politik yang menekankan kesetaraan dan persamaan ke arah logika ekonomi.

UPI sesungguhnya memiliki potensi untuk menjawab tantangan tersebut di atas. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui pemantapan program studi lama dan perluasan program studi baru yang dapat membekali para lulusan dengan kompetensi kompetitif, baik untuk memenuhi lapangan kerja di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian peningkatan kapasitas membangun selama lima tahun mendatang yang didukung pula oleh modernisasi kampus. Ini berarti peningkatan kapasitas dan modernisasi sebagaimana diuraikan di atas mutlak diperlukan demi terwujudnya universitas pelopor dan unggul.

BAB II

ANALISIS KONDISI DAN ASUMSI-ASUMSI

A. KEKUATAN

1. UPI saat ini memiliki 1.298 dosen, (60,86% berkualifikasi S2 dan/atau S3, dan 60 orang di antaranya memiliki jabatan Guru Besar) dan 785 tenaga administrasi untuk melayani 29.262 orang mahasiswa.
2. UPI memiliki fasilitas perkantoran, perkuliahan, olahraga, gedung dan laboratorium berstandar internasional (FPMIPA), serta rencana modernisasi kampus yang didanai bantuan *Islamic Development Bank* yang pembangunannya akan dimulai tahun 2006.
3. Modernisasi kampus akan dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga citra UPI akan meningkat.
4. Peningkatan jumlah kemitraan MoU dalam dan luar negeri, yang sampai saat ini telah mencapai lebih dari lima puluh, akan meningkatkan keberagaman kegiatan UPI.
5. UPI dengan sistem multikampus dapat memperluas pelaksanaan Tridharma secara lebih aktif dan produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Tersedianya infrastruktur ICT di kampus akan memodernisasi sistem pembelajaran, *on-line management*, *e-learning* dan *virtual library* sehingga

mutu proses dan hasil pembelajaran akan semakin meningkat, efektif dan efisien.

7. UPI memiliki potensi yang kuat dalam bidang keilmuan, kependidikan, kesenian, dan olahraga yang ditandai oleh tingginya tingkat partisipasi dan prestasi sivitas akademika baik tingkat nasional maupun internasional.
8. Hasil akreditasi terhadap program-program studi pada Pascasarjana menunjukkan kualifikasi yang sangat baik. Untuk jenjang S-2, dari sebelas program studi, sepuluh program studi terakreditasi A atau Unggul (U) dan satu program studi terakreditasi B. Untuk jenjang S-3, kesembilan program studi terakreditasi Unggul (U).
9. Terdapat potensi kapasitas membangun yang besar di kalangan staf akademik untuk menghasilkan karya besar, termasuk kemampuan dalam penyelenggaraan Tridharma secara utuh, apalagi kalau potensi itu dapat dihimpun menjadi kekuatan kolektif melalui manajemen yang baik.
10. UPI memiliki kredibilitas yang sangat memadai sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bidang pendidikan. Hal ini didasarkan pada pengakuan secara nasional dan internasional, yang dibuktikan oleh prestasi sejak awal pertumbuhannya, sehingga terbangun reputasi yang baik.

B. KELEMAHAN

1. Sistem manajemen Tridharma PT dan kemahasiswaan serta perkantoran belum optimal, sehingga sejumlah unit manajemen tidak berjalan efisien.

2. Dana yang berasal dari pemerintah dan yang terhimpun dari masyarakat masih jauh dari memadai. *Unit cost* rata-rata per mahasiswa per tahun di negara maju mencapai Rp 80 juta, sementara di Indonesia hanya Rp 18 juta. Untuk mahasiswa UPI, *unit cost* rata-rata mahasiswa per tahun baru sebesar Rp 5,6 juta (30%).
3. Hasil akreditasi program studi S1, dari 56 program studi, baru delapan program studi berpredikat unggulan (A) sisanya dalam proses akreditasi.
4. UPI memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, baik berupa kepakaran para dosen maupun sarana prasarana kampus. Kampus-kampus daerah, misalnya, dapat dijadikan lahan untuk mengembangkan program-program unggulan atau sekolah-sekolah percontohan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
5. Keterbatasan dana dan fasilitas laboratorium dan *workshop* menyebabkan lembaga ini belum dapat berfungsi secara optimal.
6. Mobilisasi SDM untuk menjalankan visi dan misi UPI sebagaimana yang diharapkan menuntut peningkatan kesejahteraan yang memadai.
7. Belum lengkapnya parameter dan pedoman-pedoman penjaminan mutu (*quality assurance*) memerlukan kegiatan khusus pengembangannya.

8. Kultur kerja yang sesuai dengan tuntutan sebuah universitas modern, dan nilai inti yang terkait dengan etos kerja yang tinggi untuk menghasilkan inovasi dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bidang pengajaran belum terbangun.

C. PELUANG

1. Perubahan UPI menjadi UPI BHMN pada intinya perubahan dari keterbatasan ke keleluasaan (otonomi) dalam mengelola universitas. Otonomi ini memberikan keleluasaan untuk melakukan berbagai terobosan kebijakan sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan global dan sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat.
2. Otonomi memungkinkan UPI menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri secara langsung. Melalui kemitraan ini UPI melakukan rujukan mutu (*benchmarking*) untuk meningkatkan kualitas, sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperluas layanan kepada publik.
3. Undang-undang tentang Guru dan Dosen serta PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberi peluang kepada UPI untuk memaksimalkan perannya sebagai LPTK baik melalui program akademik maupun sertifikasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan minat lulusan SLTA untuk menjadi guru atau tenaga kependidikan lainnya, tetapi juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan untuk sertifikasi guru atau dosen. Dengan demikian citra dan kredibilitas UPI akan meningkat.

4. Otonomi daerah, yakni pelimpahan sebagian besar kewenangan pusat berikut anggarannya kepada pemerintah daerah, merupakan peluang bagi UPI untuk menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan ipteks.
5. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD memberi peluang bagi UPI untuk berperan serta secara lebih aktif dalam memperbaiki kualitas pendidikan.

D. ANCAMAN

1. Rendahnya daya dukung anggaran pendidikan dari pemerintah mengharuskan UPI menggali sumber dana pendamping dan menggunakannya secara efisien.
2. Perolehan dana penelitian sangat terbatas karena kurangnya proposal penelitian yang kompetitif.
3. Peta kebutuhan daerah yang dapat dijadikan dasar bagi UPI dalam menyusun program pengabdian pada masyarakat belum teridentifikasi dengan baik.
4. Transisi demokrasi dan perubahan sistem politik nasional tidak diimbangi dengan kesiapan pendidikan politik melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, sehingga mengurangi nilai edukatif program Ormawa dan alumni sebagai bagian dari aset pendidikan universitas.

5. Berkurangnya jumlah guru besar, masih rendahnya prosentase dosen berkualifikasi pendidikan S3, dan tidak seimbang penyebaran tugas dan perannya menyebabkan rendahnya daya dukung SDM terhadap peningkatan mutu kinerja universitas.
6. Mekuatnya otonomi dan desentralisasi pemerintahan menuntut UPI sebagai PTN BHMN untuk melakukan penataan struktur organisasi, tatapamong, sistem manajemen, dan budaya kerja, yang menjamin organisasi yang kuat, efisien, transparan, demokratis, akuntabel, serta memiliki daya respon terhadap berbagai perubahan kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat.
7. Persaingan global, perkembangan ipteks dan tuntutan produktivitas universitas menuntut ketersediaan fasilitas pendidikan berstandar internasional, kesiapan SDM, dan sistem manajemen yang handal.
8. Modernisasi, liberalisasi, dan kapitalisasi dunia bisnis yang bersifat global menuntut UPI untuk dapat mengembangkan bisnis yang bersifat nirlaba untuk mendukung kapasitas dan kapabilitas universitas.
9. Rendahnya tingkat kesejahteraan yang disebabkan oleh sistem penggajian PNS dan kondisi ekonomi negara mengharuskan UPI melakukan revitalisasi kebijakan peningkatan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan mutu kinerja universitas.
10. Perkembangan budaya, peradaban dunia, dan menurunnya moralitas bangsa mengharuskan UPI memperkuat komitmen untuk memperkokoh kehidupan

beragama sebagai dasar untuk mewujudkan kampus yang edukatif, ilmiah dan religius.

11. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan LPTK mengharuskan UPI melakukan revitalisasi sistem komunikasi dan informasi.
12. Munculnya perguruan tinggi yang dikelola dan didukung oleh manajemen yang kuat dari pihak asing dengan program-program kompetitif dalam merespons tuntutan pasar kerja dan penciptaan lapangan kerja secara langsung dapat memperlemah daya saing UPI, baik dalam hal penerimaan jumlah mahasiswa pendaftar program kependidikan maupun dalam pengembangan program non-kependidikan.

E. ASUMSI-ASUMSI

Pengembangan Rencana Strategis UPI 2006-2010 dilandasi oleh asumsi-asumsi berikut:

1. Pertumbuhan penduduk usia pendidikan tinggi dalam periode lima tahun ke depan mengalami lonjakan yang tajam. Sementara itu, daya tampung pendidikan tinggi relatif konstan dalam jumlah yang terbatas.
2. Tuntutan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan semakin tinggi sejalan dengan perkembangan ipteks dan tuntutan masyarakat.
3. Pemberlakuan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19/2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan dan UU tentang Guru dan Dosen berpengaruh terhadap penyesuaian kurikulum LPTK untuk memenuhi persyaratan guru yang profesional dan kompeten.

4. Modernisasi kampus dan fasilitas pendidikan menjadi pendorong peningkatan citra UPI secara internal dan eksternal.
5. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang semakin tersebar ke kampus daerah memungkinkan peningkatan akses pendidikan secara luas yang akan mendorong UPI untuk melakukan *distance learning* dan *e-learning*.
6. Kompleksitas problematika pendidikan akan meningkat sehingga menuntut kajian yang mendalam dan komprehensif.
7. Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat semakin diperlukan.
8. Optimalisasi potensi mahasiswa memerlukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.
9. Modernisasi kampus merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.
10. Peningkatan layanan, kinerja, dan produk universitas memerlukan sumber daya manusia yang handal sesuai dengan tuntutan profesi.

11. Jejaring dan kemitraan dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional diperlukan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan pembangunan citra lembaga.
12. Pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah yang diperbaiki dengan UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada UPI untuk melakukan diversifikasi program studi dan layanan pendidikan.
13. Unggulan-unggulan yang dimiliki UPI, baik SDM maupun fasilitas, dapat diberdayakan untuk menggali sumber dana pendukung.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

2006 -2010

VISI

Dalam sejarah perkembangannya, UPI telah tampil menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang secara konsisten berkiprah dalam bidang pendidikan. Namun, kejagan ini tidak membuat UPI mandeg dalam menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tuntutan masyarakat. Bahkan sebaliknya, perubahan global sekarang ini merupakan peluang bagi UPI untuk tampil mengambil inisiatif dan mengembangkan inovasi pendidikan. Dengan karakter seperti itu dan dengan segenap sumber daya yang dimilikinya, UPI menetapkan visi untuk menjadi

Universitas Pelopor dan Unggul *(a leading and outstanding university)*

dalam disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu di Indonesia pada tahun 2010, dan menjadi salah satu universitas pelopor dan unggul di Asia pada tahun 2025. Disiplin keilmuan lain yang dikembangkan di UPI tetap didorong dan difasilitasi untuk meraih kepeloporan dan keunggulan. Visi tersebut menyiratkan tekad kuat dari seluruh sivitas untuk menjadikan UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang terpadang, berwibawa baik pada tataran nasional maupun internasional sehingga mampu memberikan inspirasi dan menjadi rujukan kebijakan pendidikan nasional.

MISI

UPI memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik profesional dan tenaga profesional lainnya yang berdaya saing global.
2. Mengembangkan teori-teori pendidikan dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan pendidikan nasional.
3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut serta memecahkan masalah nasional baik dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

TUJUAN

Secara umum tujuan pendidikan UPI bermuara pada upaya pengembangan manusia yang beriman, bertaqwa, bermoral, berakhlak mulia, berilmu, profesional, religius, dan memiliki integritas dan cinta terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara rinci tujuan itu adalah:

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi ilmuwan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga profesional lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompentensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni.

3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pendidikan dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.

PRIORITAS PENGEMBANGAN LIMA TAHUN KE DEPAN

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan prioritas pengembangan UPI lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan;
2. Modernisasi kampus dan fasilitas serta pengembangan jaringan ICT;
3. Penataan kelembagaan dan sistem manajemen dalam masa transisi UPI BHMN;
4. Pengembangan usaha;
5. Pengokohan kehidupan beragama;
6. Peningkatan kesejahteraan;
7. Peningkatan citra UPI;

Implementasi prioritas pengembangan di atas didukung oleh strategi dasar berikut:

1. Kepemimpinan yang transparan, konsisten, dan mengutamakan kebersamaan.
2. Pengelolaan kelembagaan yang sinergis, efisien, dan produktif.
3. Profesionalisme dalam manajemen.
4. Partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka melalui penguatan peran unit-unit dasar.
5. Jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. Pendidikan

Kebijakan dalam bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan kompetitif, perluasan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, menyempurnakan dan memantapkan program studi dan kurikulum, meningkatkan mutu Proses dan hasil Belajar Mengajar (PBM), mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi pendidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tampung beberapa program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan ketenagaan dan fasilitas;
2. Memberdayakan program studi, jurusan, dan fakultas yang ada dan mengembangkan yang baru yang berdaya saing kuat dan sesuai dengan *platform* UPI;
3. Mengembangkan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dan tenaga profesional lainnya dalam rangka sertifikasi;
4. Mengembangkan sistem belajar jarak jauh, sehingga UPI menjadi universitas yang melaksanakan *dual system* yang bermutu dalam pelaksanaan pembelajaran;
5. Mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum, silabus, dan kalender akademik, sesuai tuntutan perundangan dan laju perkembangan di lapangan secara berkelanjutan

serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasinya;

6. Menetapkan standar mutu akademik dan memantau ketercapaian standar;
7. Meningkatkan mutu program, proses, dan hasil pembelajaran;
8. Meningkatkan kegiatan seminar dan lokakarya akademik, penulisan buku ajar dan modul bahan ajar;
9. Mengembangkan kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
10. Merintis kelas-kelas internasional.
11. Menyempurnakan sistem informasi manajemen akademik termasuk peningkatan pelayanan prima dalam bidang akademik;

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Meningkatnya jumlah mahasiswa sebanyak 25% yang ditandai dengan semakin besarnya jumlah mahasiswa program pascasarjana;
2. Terbentuknya antara lima sampai sepuluh program studi baru S1/S2/S3 dan diupayakan satu fakultas baru yang berdaya saing kuat di tingkat nasional;
3.
 - a. Terselenggaranya program sertifikasi untuk semua program studi;
 - b. Terlaksananya program pengalaman profesi secara optimal.
 - c. Meningkatnya prosentase lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Terlaksananya sistem belajar jarak jauh untuk menunjang pelaksanaan *dual system* dalam pembelajaran;

5. a. Tersusunnya kurikulum baru untuk setiap program studi yang adaptif terhadap tuntutan perundangan, perkembangan ipteks dan tuntutan masyarakat
b. Tersusunnya deskripsi dan silabus untuk semua mata kuliah yang diperbaharui secara berkelanjutan;
c. Terlaksananya evaluasi tahunan kurikulum;
6. a. Tersusunnya standar mutu akademik;
b. Terlaksananya pemantauan tahunan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan standar mutu yang berlaku;
7. a. Rata-rata IPK lulusan minimal sebesar 3,15 (Diploma), 3,25 (S1), 3,35 (S2), dan 3,55 (S3)
b. Rata-rata lama penyelesaian studi: 5 semester (D2, selama program masih ada), 7 semester (D3), 9 semester (S1), 5 semester (S2), dan 7 semester (S3)
c. Terakreditasinya seluruh program studi dengan predikat:
 - minimal B (D2, dan S1 PGSD/PGTK dan D3 Teknik),
 - 40 % dengan predikat A (S1),
 - A atau U untuk S2 dan S3.
8. Terbitnya 100 judul buku ajar dan modul bahan ajar.
9. a. Terlaksanakannya MoU yang sudah ditandatangani;
b. Terselenggaranya 20 kerjasama baru dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.
10. Terselenggaranya tiga program studi berstandar internasional.
11. a. Terlaksananya sistem *student link* secara akurat.
b. Terbangunnya sistem layanan akademik untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bidang-bidang khusus.

B. Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan penelitian dan pengembangan difokuskan untuk mendorong tumbuhnya penelitian yang bermutu dan dikelola secara baik, sehingga melahirkan karya penelitian dan inovasi yang unggul, mutakhir, terdiseminasi secara luas, serta memperoleh pengakuan secara nasional atau internasional.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian.
2. Memfasilitasi pengembangan payung penelitian dan kelompok-kelompok penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dan antardisiplin.
3. Mengembangkan sistem informasi penelitian.
4. Memfasilitasi pengembangan proposal penelitian yang bermutu dan berdayasaing tinggi.
5. Mengembangkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.
6. Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
7. Melakukan penelitian berkenaan dengan persoalan-persoalan profesionalisme guru/pendidik, kepribadian guru/pendidik, yang sesuai dengan moralitas bangsa.
8. Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi tingkat nasional atau internasional;
9. Merintis pengembangan pusat pengkajian dan penelitian yang bertaraf nasional dan internasional.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Lima puluh dosen terlatih dalam manajemen dan metodologi penelitian yang dapat memenangkan penelitian hibah bersaing.
2. Payung penelitian pada tingkat universitas, fakultas, jurusan dan program studi.
3. Dokumentasi hasil penelitian secara *on-line*.
4. a. Seratus proposal yang berkualitas dan kompetitif untuk memperoleh dana penelitian.
b. Pengajuan dua buah hasil penelitian untuk memperoleh hak karya intelektual (paten).
5. a. Lima proyek kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi atau lembaga luar negeri.
b. Sepuluh proyek kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah atau swasta.
6. Enam puluh inovasi pembelajaran yang berbasis riset dalam perkuliahan dan persekolahan.
7. Satu proyek penelitian tentang profesionalisme guru/pendidik, kepribadian guru/pendidik, yang sesuai dengan moralitas bangsa.
8. a. Sepuluh nomor jurnal internasional terbitan UPI.
b. Tiga puluh artikel karya penelitian dosen diterbitkan dalam jurnal internasional.
9. Satu Pusat Studi Pendidikan Inklusi dan Pusat Kajian Islam serta *International Council on Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance* (ICHPER- SD) Asia.

C. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk mendorong terwujudnya pengabdian yang bermutu dan sinergis pada masyarakat pendidikan khususnya dan masyarakat luas umumnya, sehingga melahirkan kegiatan

dan hasil pengabdian yang terkait pada pendidikan dan penelitian, memberdayakan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, menyediakan layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah kepada masyarakat luas.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Mengembangkan payung program pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakannya, termasuk yang berbasis hasil penelitian.
2. Mengadakan pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan jejaring kemitraan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mempublikasikan program dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Melaksanakan program layanan pendidikan masyarakat yang menambah pendapatan universitas.
6. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil dalam mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dan sinergis.
7. Merintis layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Terwujudnya lima payung program prioritas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta.
2. Terlaksananya sepuluh jenis pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat pendidikan maupun umum.

3. Terlaksananya dua puluh program pengabdian kepada masyarakat berbasis kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta.
4. Terwujudnya sepuluh publikasi tengah tahunan kegiatan-kegiatan unggulan pengabdian kepada masyarakat.
5. Terlaksananya sepuluh program layanan pendidikan masyarakat yang menambah pendapatan universitas.
6. Enam orang dosen/tim dosen dalam setahun yang mendapat penghargaan.
7. Terlaksananya empat rintisan layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah.

D. Kemahasiswaan

Kebijakan dalam bidang kemahasiswaan dan hubungan alumni berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma PT guna memperoleh dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang mantap, menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan itu terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat bakat, pengembangan kepribadian dan seni budaya, olah raga, peningkatan pendidikan keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, dan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai moral norma luhur dan bahaya obat terlarang dan psikotropika, serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan UPI.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menata manajemen kelembagaan dan lingkungan ormawa serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
2. Mengembangkan model-model untuk memfasilitasi pembinaan kepemimpinan ormawa.
3. Mengembangkan sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa serta model-model pembinaan dan pengembangannya.
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan tingkat wilayah dan nasional.
5. Mengembangkan sistem pembinaan kepribadian, seni budaya dan olah raga.
6. Menyelenggarakan pertunjukan dan perlombaan seni budaya dan berbagai cabang olah raga yang berskala regional, nasional maupun internasional.
7. Mengembangkan model-model pembinaan untuk memperkuat ketahanan fisik maupun mental, guna menangkal erosi norma luhur, obat terlarang dan psikotropika.
8. Mengembangkan sistem pengelolaan asrama dan pemonudukan mahasiswa.
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan santunan kecelakaan/kematian.
10. Memantapkan jaringan kerjasama untuk memperbanyak peluang beasiswa bagi peningkatan kesejahteraan mahasiswa.
11. Meningkatkan partisipasi alumni dalam pengembangan UPI.
12. Memantapkan program bimbingan dan konseling karier mahasiswa.
13. Memberdayakan POMA untuk pengembangan kemahasiswaan.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. a. Revitalisasi ormawa dan UKM sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2004 dan ART UPI.
b. Tertatanya kelembagaan dan lingkungan ormawa serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
c. Terbentuknya kepengurusan ormawa yang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2004 dan ART UPI.
2. Tersusunnya model-model pembinaan kepemimpinan ormawa pada program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
3. Tersusunnya sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa serta model-model pembinaan kegiatan ormawa.
4. a. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional
b. Juara lomba karya ilmiah mahasiswa (LKTM, PKM, LKIM, dan LKIP) pada tingkat wilayah dan nasional.
c. Juara pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
d. Juara MTQ Mahasiswa Tingkat Wilayah dan Nasional
5. a. Juara Lomba Karya Seni Budaya tingkat wilayah dan nasional.
b. Juara Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat wilayah dan nasional.
6. Meningkatnya prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional dalam berbagai bentuk seni budaya dan berbagai cabang olah raga hingga 2 %.
7. a. Menguatnya kepribadian pendidik/pakar yang berbudaya Indonesia.
b. Menurunnya peluang kasus mahasiswa yang terkena HIV dan Narkoba hingga seminimal mungkin.

8. Meningkatkan daya tampung dan kualitas layanan pada mahasiswa pengguna jasa asrama dan pemondokan yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
9. a. Pemberian santunan kesehatan, kecelakaan/kematian minimal 3%.
b. Menurunnya angka sakit, kecelakaan/kematian, hingga di bawah 1 %.
10. a. Terbentuknya jaringan kerjasama dengan pemberi beasiswa (Lembaga Pemerintah Pusat/Pemda, BUMN, Swasta, dan Yayasan) dalam dan luar negeri.
b. Bertambahnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa hingga mencapai 15 %.
11. a. Revitalisasi IKA dalam mendukung pengembangan UPI BHMN.
b. Meningkatnya partisipasi jumlah alumni dalam kegiatan-kegiatan pengembangan UPI mencapai 20%.
12. Terselenggaranya bimbingan dan konseling karier mahasiswa minimal dua kali setahun.
13. a. Revitalisasi persatuan orangtua mahasiswa tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi.
b. Meningkatnya peran POMA untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
c. Optimalisasi peran POMA dalam membantu pengembangan UPI BHMN

E. Modernisasi Kampus dan Fasilitas

Kebijakan ini difokuskan pada modernisasi kampus dan fasilitas berstandar internasional dengan menempatkan realisasi bantuan IDB dalam prioritas tinggi.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan fisik dan fasilitas kampus berstandar internasional yang dibiayai IDB.
2. Memantapkan sistem manajemen fasilitas berdasarkan penjaminan mutu yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan secara sistemik dan komprehensif.
3. Mengupayakan dan memberdayakan berbagai bantuan dari dalam dan luar negeri untuk pengembangan fasilitas.
4. Meningkatkan sistem sekuriti dan manajemen kampus.
5. Memperluas, mengembangkan dan memberdayakan sistem pengelolaan tata ruang kampus.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. terselesaikannya tiga belas unit gedung baru serta kelengkapannya sesuai dengan rencana pembangunan dari IDB.
2. Sempurnanya pedoman sistem manajemen fasilitas, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan.
3. a. Diperoleh dan diberdayakannya dana hibah dan bantuan teknis dari tiga negara donor.
b. Diperoleh dan diberdayakannya bantuan dana dari lima lembaga pemerintah dan swasta.
4. a. Terlatihnya 200 orang tenaga keamanan kampus.
b. Rendahnya gangguan keamanan kampus.
c. Tertibnya manajemen perparkiran kendaraan dalam kampus.
5. a. Tersusunnya sistem pengelolaan tata ruang kampus.
b. Terbelinya tanah seluas kurang lebih 1.000 m².

F. Peningkatan Jaringan ICT

Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur serta sistem informasi akademik dan manajemen berbasis ICT.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Memperluas pembangunan infrastruktur ICT.
2. Menyempurnakan sistem informasi manajemen universitas yang lengkap, akurat dan mutakhir.
3. Meningkatkan kapasitas dan fungsi UPI Net.
4. Mengembangkan *e-learning*.
5. Mengembangkan *e-management* baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
6. Mengembangkan perpustakaan berbasis ICT (*virtual library*).

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Terpasangnya infrastruktur ICT yang menghubungkan seluruh unit di kampus induk dan kampus daerah dengan tingkat keamanan yang tinggi;
2. Meningkatnya *bandwidth* menjadi 5 Mbps;
3. Sebanyak 25% sivitas akademika dan tenaga administrasi universitas dapat memanfaatkan layanan internet;
4. Sebanyak 10 program studi memanfaatkan jaringan ICT untuk menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem *e-learning*.
5. Sistem informasi manajemen universitas yang dapat memberikan 75% layanan data dan informasi secara lengkap, akurat dan mutakhir;
6. Layanan *virtual library* untuk 25% mahasiswa dan dosen.

G. Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen

Kebijakan ini difokuskan pada pembaharuan sistem tatanan kelembagaan dan pengelolaan universitas yang efisien dan efektif, serta memiliki akuntabilitas yang mantap untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

2. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan penataan sistem manajemen sesuai dengan AD/ART.
3. Menyusun prosedur dan tatakerja baru sesuai dengan pembaharuan yang telah ditetapkan.
4. Menyiapkan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan sesuai dengan sistem yang baru.
5. Mengembangkan sistem manajemen keuangan.
6. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu.
7. Mengembangkan sistem manajemen perguruan tinggi modern berstandar internasional.
8. Meningkatkan kinerja manajemen kampus daerah.
9. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah laboratorium–percontohan.
10. Menata dan memberdayakan unit-unit pendukung, dan unit bisnis pendukung sesuai dengan ketentuan AD/ART.
11. Mengembangkan sistem manajemen penghematan energi.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Terwujudnya sistem organisasi dan manajemen sesuai dengan kebutuhan universitas berdasarkan PP No. 6/2004 dan ART UPI.

2. Terlaksananya prosedur dan tata kerja sesuai dengan mekanisme untuk meningkatkan kinerja manajemen.
3. Berfungsinya seluruh komponen manajemen kelembagaan sesuai dengan tuntutan PP No. 6/2004 dan ART UPI.
4. Terwujudnya sistem manajemen keuangan yang memenuhi standar akuntansi instansi.
5.
 - a. Tersusunnya standar mutu manajemen dan akademik.
 - b. Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan setiap tahun.
 - c. terselesaikannya lima kali Audit Internal terhadap seluruh unit yang ada di UPI.
 - d. terselesaikannya laporan audit oleh Dewan Audit.
6. Terwujudnya sistem manajemen perguruan tinggi modern sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Meningkatnya kinerja manajemen kampus daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
8. Terselenggaranya sekolah laboratorium--percontohan sebanyak empat buah SD dan satu SLTP di Kampus UPI yang mampu memberikan layanan pendidikan bermutu berbasis hasil penelitian.
9. Meningkatnya peran dan fungsi unit-unit bisnis pendukung untuk menjalankan sistem manajemen kampus.
10. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan energi.

H. Penataan SDM

Kebijakan dalam bidang penataan sumberdaya manusia (SDM) difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan SDM, rekrutmen pegawai universitas terutama tenaga akademik secara selektif sesuai dengan kebutuhan nyata universitas, tersusunnya pedoman

pengalihan dan pengembangan pegawai universitas dan penataan SDM sesuai dengan struktur organisasi UPI BHMN menurut PP Nomor 6 Tahun 2004 dan ART Tahun 2006.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Mengembangkan kode etik tenaga edukatif dan peneliti serta pedoman dan pelaksanaan penataan pegawai UPI sesuai dengan kebutuhan organisasi UPI berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2004 dan ART UPI.
2. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan rekrutmen pegawai universitas terutama tenaga akademik sesuai dengan kebutuhan universitas.
3. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan pembinaan SDM universitas sesuai dengan tuntutan UPI BHMN
4. Meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial profesionalisme, budaya kerja, dan disiplin kerja yang tinggi dalam kaitannya dengan kapasitas membangun universitas.
5. Meningkatkan kualifikasi, mutu, dan jumlah SDM.

Ketercapaian program di atas selama lima tahun dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

1. Tersusunnya pedoman dan pelaksanaan penataan pegawai UPI (administrasi dan akademik) sesuai dengan kebutuhan organisasi UPI berdasarkan PP Nomor 6/2004 dan ART UPI;
2. a. Sempurnanya pedoman rekrutmen pegawai universitas yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan universitas.
b. Pengangkatan tenaga dosen diutamakan terhadap mereka yang berkualifikasi pendidikan minimal S-2 dan

- tenaga teknisi/administrasi berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. a. Sempurnanya pedoman pembinaan dan kode etik SDM universitas.
b. Terlaksananya pembinaan kepada seluruh dosen dan tenaga administratif.
 4. a. Meningkatnya kemampuan ilmiah, kepribadian, profesi dan sosial tenaga akademik dan tenaga administrasi.
b. Terwujudnya budaya kerja korporat di kalangan tenaga akademik dan tenaga administrasi sesuai dengan tuntutan UPI BHMN.
c. Meningkatnya kehadiran seluruh tenaga akademik dan tenaga administrasi sesuai dengan jam kerja sampai 100%.
 5. Meningkatnya kualifikasi pendidikan tenaga akademik menjadi 70% untuk S2 dan 20% untuk S3, serta jumlah Guru Besar menjadi 100 orang.

I. Pengembangan Usaha

Kebijakan ini difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan aset universitas untuk menghasilkan pendapatan sebagai dana pendamping.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Menyempurnakan *Business Plan* universitas.
2. Mengembangkan dan melaksanakan usaha universitas berbasis akademik (*academic venture*).
3. Mengembangkan model inkubator usaha universitas.
4. Membangun pusat layanan jasa konsultansi, kepakaran dan kelembagaan.
5. Membangun pusat pendidikan dan pelatihan SDM.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Sempurnanya *Business Plan* universitas;
2. Beroperasinya lima unit pendukung usaha akademik;
3. Berdirinya lima unit Inkubator usaha bisnis universitas;
4. Beroperasinya lima Pusat Layanan Jasa Konsultansi, kepakaran dan kelembagaan;
5. Terselenggaranya Pusat Layanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM.

J. Peningkatan Kesejahteraan

Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan sistem kesejahteraan yang dapat memotivasi peningkatan kinerja tenaga akademik maupun non-akademik.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja SDM;
2. Menerapkan sistem evaluasi berbasis kinerja bagi tenaga dosen dan administrasi, sehingga berdampak terhadap perbaikan kesejahteraannya;
3. Menata sistem pengembangan karir;
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga akademik dan administrasi yang akan memasuki masa purna bakti.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Terlaksananya sistem insentif pegawai berbasis prestasi kerja, yang secara bertahap terus meningkat;

2. a. Terselenggaranya evaluasi kinerja secara periodik bagi dosen dan tenaga administrasi;
b. Terselenggaranya penilaian secara terpadu oleh pimpinan unit dan mahasiswa pada setiap semester;
c. Diberlakukannya rotasi dan mutasi sesuai dengan hasil penilaian kinerja.
3. Terlaksananya sistem pengembangan karir berbasis kinerja;
4. Terselenggaranya pelatihan keterampilan wira usaha untuk sekurang-kurangnya 60% pegawai yang memasuki masa purna bakti.

K. Pengokohan Kehidupan beragama

Kebijakan ini difokuskan pada penyelenggaraan program pengembangan dan pengokohan kehidupan beragama, yakni sebagai berikut:

1. Menyenggarakan pendidikan agama;
2. Mengembangkan pusat studi Islam;
3. Meningkatkan mutu kehidupan beragama;
4. Mengoptimalkan fungsi masjid Al Furqan untuk penyelenggaraan tutorial pendidikan agama Islam;

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan perundangan;
2. Terbentuknya pusat studi Islam bertaraf internasional;
3. Meningkatnya mutu kehidupan beragama di kalangan sivitas universitas.
4. Meningkatnya kualitas kegiatan tutorial Pendidikan Agama Islam di masjid Al Furqon.

L. Peningkatan Citra UPI

Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan citra lembaga yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang visi, misi, program, dan keunggulan UPI, menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat profesi serta masyarakat umum, agar mampu mengangkat citra kelembagaan di masyarakat nasional dan internasional.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Menguatkan fungsi kehumasan;
2. Merintis pengembangan *UPI Press*;
3. Menerbitkan koran kampus *UPI Chronicle*;
4. Mengembangkan kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan UPI;
5. Menyelenggarakan seminar/konferensi nasional dan internasional.

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut:

1. Meningkatnya peran Lembaga/Unit Humas UPI.
2. Operasionalisasi *UPI Press*.
3. Penerbitan koran kampus *UPI Chronicle* triwulanan secara berkelanjutan.
4. Publikasi profil UPI dalam sejumlah media massa cetak dan elektronik setiap enam bulan.
5. Terselenggaranya seminar/konferensi nasional dan internasional tahunan;

PENUTUP

Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2006-2010 merupakan dasar pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan seluruh unit kerja di lingkungan universitas. Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam rencana strategis menghadapi kendala untuk dilaksanakan, maka pimpinan universitas dapat melakukan perubahan dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas akademika UPI hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan sungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT.